



2023

LAPORAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



FACEBOOK:
[DISKOMINFOSANMALUT](#)



INSTAGRAM:
[KOMINFO_MALUT](#)



WEBSITE:
WWW.DISKOMINFOSAN.MALUTPROV.GO.ID

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LKj OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, LKj OPD merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kominfo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang benar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

LKj OPD adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Diskominfo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj OPD.

Adapun tujuan penyusunan LKj OPD adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj OPD juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj OPD ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Sofifi, 26 Januari 2024

KEPLA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
PROVNSI MALUKU UTARA



DR. IKSAN.RA.ARSAD, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701104 198902 1 001

Ringkasan Eksekutif

Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Provinsi Maluku Utara merupakan Dinas teknis yang mengemban urusan wajib, Dengan berubahnya paradigma, lingkungan yang dinamis, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa Komunikasi dan Informatika semakin serta berkembangnya Teknologi Informasi, merupakan Tantangan besar bagi pembangunan Infra struktur disektor Kominfosan di Maluku Utara dan merupakan salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong keberhasilan Program Nasional pada umumnya.

Komunikasi Informatika dan persandian merupakan tulang punggung (backbone) dan urat nadi pembangunan yang sangat amat di butuhkan oleh masyarakat tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat seperti Ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan alain-lain di Maluku Utara.

Melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang nyata dan berkesinambungan yang di wujudkan kedalam Program dan Kegiatan sesuai Kepmendagi no. 050-3708 tahun 2020 akan dapat mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan di Kabupaten/kota maupun pedesaan yang dijabarkan melalui tugas dan pokok fungsi Dinas Kominfosan Provinsi Maluku Utara yaitu perumusan dan kebijakan teknis, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan, fasilitasi.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Provinsi Maluku Utara, dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pada urusan Kominfo, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas Sebagaimana di uraikan dalam BAB I sampai BAB IV di bawah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
I GAMBARAN UMUM	1
1.1. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.2. SUMBERDAYA ORGANISASI.....	17
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	32
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	32
2.2. VISI /MISI	33
2.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	33
2.4. STRATEGI	37
2.5. KEBIJAKAN.....	38
2.6. PROGRAM.....	31
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	49
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	56
3. REALISASI KEUANGAN	57
BAB. IV. PENUTUP.....	62
1. TINJAUAN KEBERHASILAN	62
2. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG TERJADI DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	62
3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika dan persandian serta ditambahkannya fungsi statistik sektoral, maka secara resmi seluruh pelayanan dan pengelolaan dibidang komunikasi dan informasi, pengamanan informasi persandian milik pemerintah daerah serta proses penyediaan data statistik sektoral telah menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara.

fungsi komunikasi dan informasi, pengamanan informasi persandian milik pemerintah daerah serta proses penyediaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini yaitu karena dunia technology informasi dan komunikasi serta kejahatan dunia maya (*cyber crime*) saat ini perkembangannya sangat cepat, bahkan untuk menjawab tantangan di era digital di era sekarang, pemerintah sebagai pelaku utama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara diperlukan kesiapan yang matang.

Salah satu bentuk kesiapan dalam menghadapi tantangan global tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang mampu dan berkembang untuk membawa roda pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, serta masyarakatnya bebas dari ancaman kejahatan transaksi melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).

Sejalan dengan hal diatas, keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dilingkup Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019, masih memiliki banyak hambatan dan tantangan dalam mengelola dan memberikan pelayanan dibidang informasi publik, layanan jaringan internet, perlindungan informasi dan komunikasi persandian serta belum tersedianya data statistik sektoral. Permasalahan secara umum dapat kami sampaikan bahwa, Diskominfo pada tahun 2019 baru memiliki kantor, masih kurangnya mebeleur (kursi, meja dan lemari), masih terbatasnya SDM yang

memiliki pemahaman, keahlian dan kemampuan dibidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Persandian Dan Statistik serta belum tersedianya data dibidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral.

Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut diatas, adalah merupakan permasalahan yang secara umum masih menjadi kendala bagi Diskominfo untuk dapat segera dipenuhi, agar Diskominfo bisa menunjukkan kiprahnya dalam mengelola dan melaksanakan berbagai tantangan di daerah. Selain masalah diinternal tersebut, permasalahan lainnya yaitu belum adanya dorongan dan pembagian pengelolaan keuangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undangan maupun kebijakan lainnya dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi dan Lembaga Sandi Negara RI dari segi pembagian dana belanja dari pemerintah pusat ke daerah otonom, mengikuti pembagian urusan antara pusat dan daerah.

Untuk itu, maka melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik *Good Governance* di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 diharapkan :

- 1) Diskominfo Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 3) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dimaksudkan untuk menyampaikan laporan dan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1.2.2. Tujuan Penyusunan LKIP

Sementara tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah sebagai sarana bagi Diskominfo Provinsi Maluku Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1. 3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

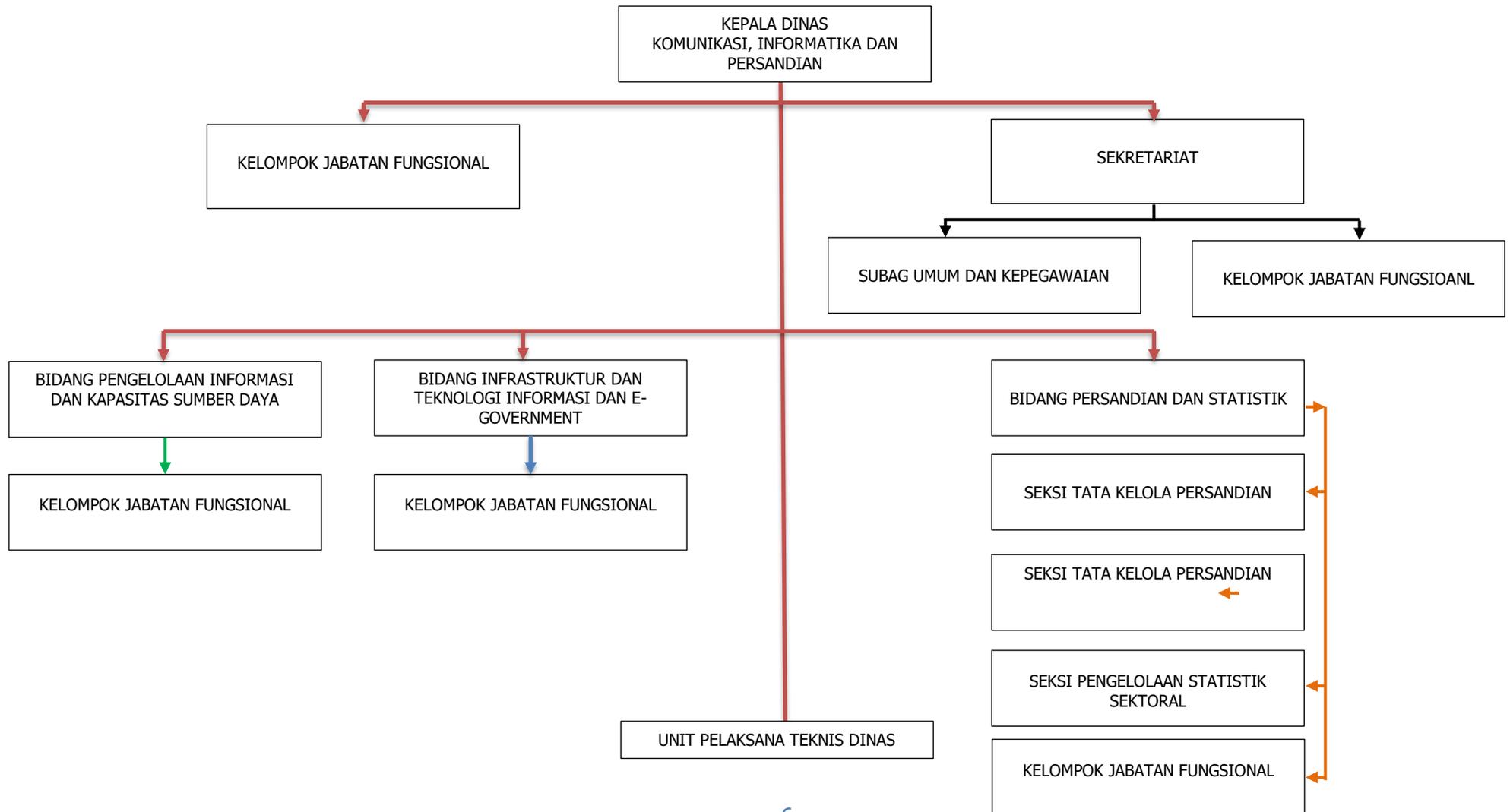
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).
12. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negri No. 050-3708 Tentang Hasil Verikasi Klsifikasi,kodefikasi dan Nomen Klotur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri 77 Tahun 2020 Tahu 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

1. 4. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1.4.1. Struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tanggal, 27 Desember 2021, yaitu sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**



1.4.2. Kedudukan Diskominfo

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Diskominfo mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup provinsi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah

Provinsi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas, dengan membawahi :
- 2) Sekretaris Dinas, yang membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya, yang membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government, yang membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Persandian dan Statistik, yang membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

1. 5. Aspek Strategi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembangan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2001, h. 8). Era baru inilah yang sekarang disebut sebagai era informasi, yang didukung satu kekuatan TIK yang dikenal dengan ICT (*information communication and technology*) dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi (Slamet, dkk., 2008, h. 51).

Keberlangsungan TIK saat ini tidak hanya terbatas pada komputer karena sekarang dapat berupa *notebook, smart phone, PDA, dll.*, sebagai media penyedia pengolah data elektronik yang dapat menyajikan berbagai informasi dan pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat (Sarwosri dan Nafisah, 2009, h. 3), memaksa semua bentuk organisasi untuk menggunakan TIK sebagai pendukung operasional maupun strateginya. Oleh karenanya hampir tidak ada organisasi baik swasta maupun pemerintah yang tidak menggunakan komputer sebagai media dalam melakukan pekerjaan atau proses bisnis/birokrasinya.

TIK ini secara potensial dapat merubah struktur organisasional pemerintah dan proses bisnis, serta jika diterapkan dengan benar akan menghasilkan manfaat bisnis, teknis, maupun organisasional (Heeks, 1999; Kraemer & King, 2003 dalam Gil-Garcial et al., 2007). Keberadaan TIK tersebut menunjukkan posisi yang sangat penting bahkan krusial bagi suatu organisasi dalam menjalankan roda bisnisnya maupun birokrasinya terutama dalam bentuk pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk layanan Electronic-Government (E-Government). Layanan ini meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Hal ini ditujukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*) baik secara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat). Untuk itu, Pemerintah harus mampu merubah dan membentuk dimensi baru kedalam organisasi, sistem manajemen maupun proses kerjanya.

Terlepas dari beragamnya definisi tentang E-Government, esensi yang terpenting dari E-Government adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini peningkatan kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik (*good governance*).

Secara generik, salah satu komponen utama E-Gov adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet. Aplikasi ini memberi informasi yang selalu *up to date* tentang berbagai hal, menyediakan data dan berbagai sumberdaya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.

Banyak manfaat yang diperoleh apabila layanan E-Government dapat berjalan dengan baik, antara lain:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan (bebas KKN);
- 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-Government sudah lama dicanangkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan e-government tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di kantor pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-government merupakan hambatan utama, selain penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan lembaga yang menangani implementasi e-government. Oleh karena itu, tidak sedikit dalam perjalanannya banyak mengalami hambatan bahkan juga kegagalan.

Dengan demikian, maka aspek strategis perangkat daerah Diskominfosan Provinsi Maluku Utara lebih pada upaya untuk menata dan mengembangkan potensi sumber daya TIK yang saat ini banyak telah dilakukan oleh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu potensi yang belum terkelola secara maksimal adalah belum terintegrasinya sistem database pada software maupun sistem informasi ke database Provinsi Maluku Utara, serta wajib meningkatkan *security sistem* atau membangun sebuah sistem pengamanan informasi dan komunikasi yang lebih efektif

melalui peran persandian dalam mengelola dan menata pengamanan informasi milik pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara.

1. 6. Isu Strategi (*strategic issue*) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Isu strategi penyelenggaraan e-government di Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental yaitu, selain adanya perubahan dari sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik menuju sistem pemerintahan yang demokratis, juga telah diterapkannya otonomi daerah. Perubahan yang terjadi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Untuk itu maka, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara melalui INPRES No. 3 Tahun 2003, berupaya untuk mendorong pemanfaatan TIK untuk instansi pemerintahan di daerah Provinsi Maluku Utara. Terlaksananya pemanfaatan TIK secara kedaerahan dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional tentang proses Pengembangan E-Government, Diskominfo melalui Dokumen Master Plan Dan Tata Kelola TIK yang telah tersusun, berusaha untuk dapat bersinergi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk bersama-sama mengembangkan dan mengelola TIK dalam beberapa tahapan. Secara garis, tahapannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat 1 – Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai sarana media informasi dan komunikasi pada setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota.
- 2) Tingkat 2 – Pengamanan, yaitu pembuatan pengamanan informasi pada semua sistem yang telah dibuat.
- 3) Tingkat 3 – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.
- 4) Tingkat 4 – Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronik layanan publik.

- 5) Tingkat 5 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers/ community (G2C)*.

e-government system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan public yang lebih efektif dan efisien (Sosiawan, 2008). Dalam penyelenggaraannya, *e-government system* mengacu pada dua hal, yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan. Adapun manfaat dari pengembangan *e-Government* adalah :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Menurut Ely Sufianti (2006), "Ketersediaan menu layanan public pada situs pemerintah daerah syogyanya merupakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. *E-government* tidak berupa website semata, yang memuat informasi dari pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu, adalah merupakan salah satu cara menuju *good governance* yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan dan akuntabel. *E-Government* juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan".

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Diskominfo Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo, maka isu-isu strategis terkait pelaksanaan pelayanan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah merupakan daerah kepulauan, sehingga untuk lebih efektif dan efisien, perlu dibangunnya sarana dan prasarana komunikasi serta sistem informasi, yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

2. Kebutuhan masyarakat akan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Maluku Utara telah mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu.
3. Ketersediaan aparatur Bidang komunikasi dan informatika serta persandian di Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas.
4. Belum terbentuknya Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) serta organisasi yang ada dibawahnya, dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
5. Minimnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Maluku Utara.
6. Belum tersedianya Data Center sebagai pusat data Provinsi Maluku Utara berbasis database.
7. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berbasis teknologi informasi/layanan online dalam menyebarluaskan informasi.
8. Belum terintegrasinya sub-sub system dengan database Provinsi Maluku Utara.
9. Belum tercapainya proses penyelenggaraan *e-government* di Provinsi Maluku Utara.
10. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi bidang Komunikasi dan Informatika.
11. Kurangnya komitmen lembaga penyiaran dalam mencerdaskan masyarakat.
12. Kurangnya keseimbangan informasi di daerah kepulauan dan perbatasan.
13. Belum tersedianya system teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat yang berada di daerah kepulauan dan di pesisir pantai.
14. Kurangnya dukungan system teknologi informasi dan komunikasi pada sector-sektor produktif.
15. Kurangnya Dukungan Anggaran yang memadai untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oada Periode yang sedang berjalan.

Isu strategis merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi, atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan berdampak panjang, sehingga menjadi faktor penghambat dalam masalah pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dari itu, berikut ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan untuk

menjawab isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1. Penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung Kantor, Ruang Data Center Dan Ruang Sandi

Perkembangan dunia teknologi saat ini maupun di masa yang akan datang telah dirumuskan, dan hasilnya adalah teknologi terus berkembang sepanjang masa, karena manusia tidak lagi mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, namun tergantikan dengan teknologi-teknologi termutakhir seperti beberapa penemuan tentang robot yang dapat melakukan aktifitas layaknya manusia.

Kehadiran teknologi di era dewasa ini juga, memberikan perubahan-perubahan yang cukup drastis, dalam memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Banyaknya manusia yang semakin pintar dalam menemukan teknologi-teknologi terbaru membuat dunia berkembang semakin pesat. Bahkan kita tidak dapat memikirkan teknologi canggih apa yang akan muncul di masa depan, sedangkan saat ini saja teknologi-teknologi mutakhir yang sangat canggih berada di sekeliling kita.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan selalu menghasilkan teknologi masa depan yang lebih canggih dari pada teknologi saat ini. Tentu semua teknologi canggih yang akan ada di masa depan adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk itu, pembangunan gedung kantor yang dilengkapi dengan adanya ruang data center serta ruang sandi dalam satu gedung, merupakan modal terbesar dalam menghadapi kemajuan teknologi tersebut.

1.6.2. Penyelenggaraan e-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Melalui beberapa isu-isu strategis diatas, isu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) merupakan isu yang perlu untuk segera diwujudkan. Isu penyelenggaraan *e-government* ini bukan hanya merupakan isu yang bersifat kedaerahan, namun isu ini adalah isu yang bertaraf internasional, karena telah menjadi salah satu tujuan utama bagi pemerintah era digitalisasi saat ini.

Dengan terwujudnya *e-government* ini tidak ada lagi sekat antara pemerintahan dengan masyarakatnya serta permasalahan-permasalahan yang terjadi maupun yang

belum teratasi, dapat secara cepat diketahui dan diselesaikan serta diatasi dengan penyelenggara-nya yang tepat dan mengurangi beban biaya yang tinggi.

Disadari bahwa, proses mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) tidaklah mudah dan bahkan memiliki tantangan yang cukup besar. Untuk itu, melalui penyelenggaraan *e-government*, tantangan besar yang dihadapi dalam pemerintahan, akan dengan sendirinya dapat teratasi dan merupakan solusi yang tepat diabad melenium seperti saat ini.

1.6.3. Penetapan Chief Information Officer (CIO)

Chief Information Officer adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya jabatan tersebut, dukungan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sangat diperlukan.

Menghadapi permasalahan lemahnya aspek perencanaan dan pengendalian penggunaan TIK untuk lembaga pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-Government, diperlukan pemahaman dan keterampilan Government Chief Information Officer (GCIO) agar apat bergerak secara serentak dan selaras sesuai dengan tujuan pembangunan TIK di Provinsi Maluku Utara dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk TIK.

Untuk memenuhi peningkatan kapasitas aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bidang CIO ini, maka akan dilakukan seleksi dan pengangkatan sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Chief Information Officer melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.

1.6.4. Business Process Reengineering

Business process reengineering (BPR) atau Rekayasa ulang proses bisnis adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. BPR juga merupakan salah satu proses perbaikan kinerja, dimana pada saat dilakukan banyak memanfaatkan IT sebagai pemampunya. Tujuan dibangunnya mesin birokrasi semacam ini adalah agar kontrol internal secara efektif dapat berjalan dengan baik.

Dampak dari pendekatan organisasi seperti ini adalah pembentukan teritori pada masing-masing perangkat daerah sehingga terkadang membuat penyelesaian

serangkaian pekerjaan menjadi lambat dan mahal. Lihatlah bagaimana masyarakat kerap di-“ping-pong” dari satu bagian ke bagian yang lain, jika yang bersangkutan ingin mendapatkan pelayanan tertentu. Di dalam e-Government, fenomena “ping-pong” semacam itu tidak boleh terjadi lagi karena akan sangat merugikan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan pemerintah.

Masyarakat saat ini menuntut agar berbagai proses pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu, harus semakin baik, cepat, dan murah. Untuk keperluan tersebut, pemerintah harus merombak ulang struktur organisasi rigid-nya agar dari yang bersifat fungsional dapat mendukung aktivitas yang berbasis proses. Jelas terlihat di sini bahwa kerja sama antara pemerintahan (lintas sektoral) harus terjadi. Di dalam e-Government, tuntutan ini dapat menjadi kenyataan bila pemerintah mengimplementasikan sistem jaringan antar pemerintahannya yang berfungsi saling tukar-menukar informasi melalui sistem informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

1.6.5. *Government Cloud Computing*

Cloud Computing dalam pemerintahan (E-Government) dapat mendongkrak kinerja khususnya dalam bidang pemerintahan. E-Government dapat membantu para staff di bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Teknologi komputer berbasis sistem Cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data, informasi dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data dan informasi pemerintah melalui komputer dengan akses internet.

1.6.6. *Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Beserta Perangkat Organisasi Yang Ada Dibawahnya*

Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) serta organisasi yang ada dibawahnya, dimaksudkan untuk melakukan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diwilayah Provinsi Maluku Utara.

1.6.7. Menata Sistem Manajemen Informasi Dilingkup Provinsi Maluku Utara

Setelah membentuk PPID dan organisasi yang ada dibawahnya, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penataan System Manajemen Informasi (SIM) berupa *software* atau aplikasi berbasis database yang telah maupun belum dibangun oleh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, guna didata, diidentifikasi dan diverifikasi kemudian dievaluasi seluruh system tersebut, agar diketahui aplikasi-aplikasi yang mirip dan yang tidak mirip, Perangkat Daerah mana yang belum membangun website, serta mana saja aplikasi yang database-nya belum terintegrasi langsung di Server Database Data Center Provinsi Maluku Utara.

1.6.8. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pembangunan Dan Pengelolaan Data Center Dan Media Center Provinsi Maluku Utara

Data center merupakan fasilitas utama dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan pemberian akses layanan informasi berbentuk system database yang berbasis pada kecanggihan teknologi sebagaimana yang telah dirasakan saat ini, guna memberikan kemudahan dan ketepatan dalam melakukan suatu aktifitas kerja, sebab data center merupakan media yang didalamnya terhimpun dan tersimpan berbagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan.

Selain data center, media center juga memiliki peran yang sangat penting, karena dengan media center ini, seluruh sumber data dan informasi yang ada pada data center akan disaring dan diolah oleh pejabat yang berwenang, untuk kemudian ditampung pada media center sebagai sarana penyedia layanan data dan informasi, agar public atau masyarakat dalam membutuhkan data dan informasi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya mengakses/mengambilnya melalui layanan media center yang telah disediakan.

1.6.9. Menjaring Dan Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Bidang Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Disadari bahwa, ketersediaan SDM Aparatur yang memiliki basic pengetahuan dan keilmuan pada bidang Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian, baik diinternal Diskominfo maupun dilingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu, Diskominfo melalui sasaran strategisnya, akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terbatas tersebut, dengan melakukan penawaran kepada generasi muda Maluku Utara yang memiliki basic

keilmuan dan pengetahuan dibidang pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian guna direkrut dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika Dan Persandian melalui tahapan-tahapan seleksi dan penjaringan.

Sementara, SDM Aparatur dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah diberikan tugas dan kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan tugas serta yang telah memiliki basic keilmuan dan pengetahuan dibidang pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian, akan lebih ditingkatkan kualitas SDM-nya melalui program dan kegiatan Diklat, Bimtek maupun yang sejenisnya, baik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun K/Lembaga Lainnya yang menyelenggarakan Diklat atau Bimtek tersebut.

1.6.10. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak-pihak Yang Berkompeten, Guna Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Maluku Utara

Masalah pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat atau public agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Selain dari pada itu, pemerintah tidak dapat dengan sendirinya, menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga membutuhkan adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat ataupun public.

Maksud dari pihak-pihak yang berkompeten disini yaitu, pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menyediakan, melaksanakan, mengelola dan yang berwenang menyelenggarakan urusan komunikasi, informatika dan persandian. Untuk itu, dengan adanya program kerjasama ini,

diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dari beberapa uraian singkat atas aspek strategi dan issue-issue strategis sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019, belum dapat dilaksanakan sebagaimana tuntutan yang telah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Master Plan Dan Dokumen Tata Kelola TIK. Hal ini dikarenakan, masih terdapat banyak kendala dan hambatan baik secara eksternal maupun internal. Untuk

itu, secara garis dapat kami sampaikan bahwa keberpihakan stakholder belum melihat tugas dan fungsi diskominfosan sebagai strategis jalur sutra dalam mengelola dan mengembangkan Maluku Utara, serta manajemen internal Diskominfosan juga belum seluruhnya memahami keberadaan Diskominfosan di dalam berpemerintahan.

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Diskominfosan

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dibidang komunikasi, informasi dan persandian masih sangat terbatas jumlahnya, yaitu baru sebanyak 43 personil dan Pegawai Perjanjian kerja Sebanyak 1 personil dan dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan sebanyak 12 personil dari kalangan pegawai tidak tetap.

Adapun gambaran dan kondisi SDM Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, dapat kami jabarkan sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel : 2.1

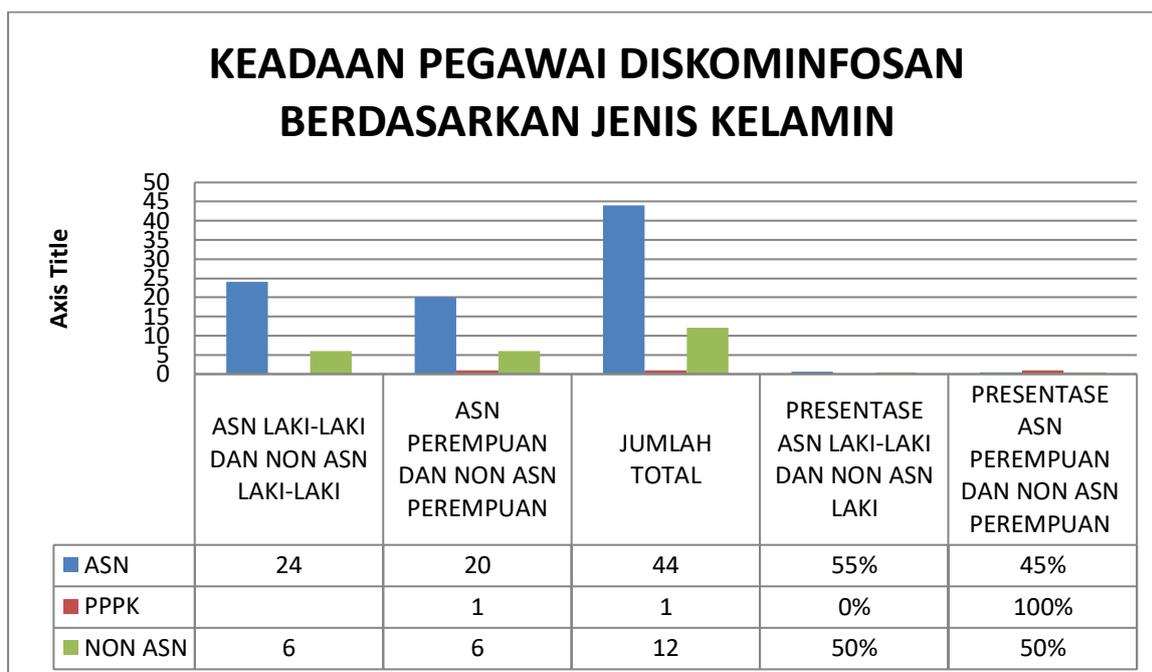
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	42	76
2	Tenaga Non ASN	12	21
3	PPPK	1	1
Total		55	98 %

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2023)

Tabel diatas menunjukkan, jumlah Aparatur Sipil Negara adalah sebanyak 42 orang atau 76 %, sementara Sebanyak 1 orang atau 1 % Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sebanyak 12 orang atau 21 % adalah berasal dari tenaga Non ASN atau PTT.

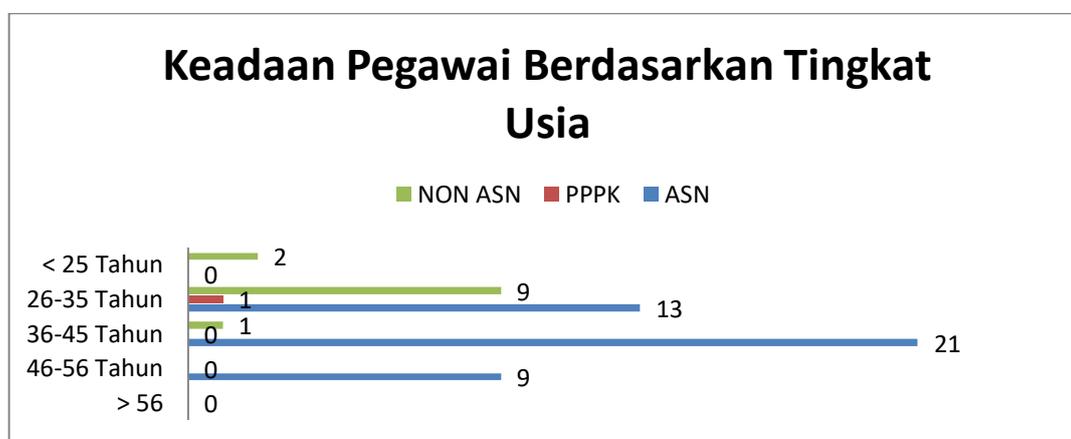
Grafik : 2.2



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d desember 2023)

Grafik diatas menunjukkan, SDM Diskominfosand didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 24 orang terbagi atas Asn laki-laki 55% dan Non Asn laki-laki sebesar 50% sementara diposisi kedua ditempati oleh perempuan yaitu sebanyak 20 orang terbagi atas Asn perempuan 45% dan Non Asn perempuan sebesar 50% dan diposisi ketiga ditempati oleh PPPK sebanyak 1 orang sebesar 100%.

Grafik : 2.3



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Juni 2020)

Berdasarkan grafik 2.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata usia produktif didominasi oleh Tenaga Non ASN yaitu pada usia 26-35 Tahun sebanyak 9 orang. Sementara ASN yang

produktif ada pada usia 36 s.d 45 Tahun sebanyak 21 Orang dan di usia 46 s.d 56 sebanyak 9 orang.

Tabel : 2.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase (%)	
		Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tenaga Non ASN		ASN	Non ASN
1	Doktor	1	0	1	1%	0%
2	Magister	5	0	5	5%	0%
3	Sarjana	19	9	28	19%	9%
4	Diploma IV	3	0	3	3%	0%
5	Diploma III	11	0	11	11%	0%
6	Diploma II	0	0	0	0%	0%
7	Diploma I	0	0	0	0%	0%
8	SMU/SMK	4	3	7	4%	3%
9	SLTP	0	0	0	0%	0%
10	SD	0	0	0	0%	0%
Total		43	12	55	43%	12%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2023)

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, tingkat pendidikan SDM Diskominfo rata-rata lulusan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 28 orang yang terdiri dari ASN dan PPPK sebanyak 19 orang atau 19 %, Tenaga Non ASN sebanyak 9 atau 9 %, sementara untuk tingkat pendidikan SMU/SMK adalah sebanyak 7 orang, terdiri dari Tenaga Non ASN sebanyak 3 orang atau 3%, dan ASN sebanyak 4 orang atau 4%.

Sementara untuk lulusan Magister (S2) dan Diploma III adalah sebanyak 16 orang, dengan rincian Magister untuk ASN adalah sebanyak 5 orang atau 5% dan Tenaga Non ASN 0 orang atau 0%, serta Diploma III untuk ASN adalah sebanyak 11 orang atau 11%. Untuk lulusan Diploma IV yaitu sebanyak 3 orang atau 3% adalah ASN.

Tabel : 2.5

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang

No	Tingkat Kepangkatan	Tingkat Golongan Dan Ruang	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	0%	0%
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	0%	0%
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1	100%	0%
4	Pembina Tk. I	IV/b	3	0	3	100%	0%
5	Pembina	IV/a	1	1	2	50%	50%
JUMLAH			5	1	6	83%	17%
6	Penata Tk. I	III/d	6	4	10	60%	40%
7	Penata	III/c	4	1	5	80%	20%
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	5	7	29%	71%
9	Penata Muda	III/a	2	2	4	50%	50%
JUMLAH			14	12	26	54%	46%
10	Pengatur Tk. I	II/d	3	1	4	75%	25%

11	Pengatur	II/c	4	2	6	67%	33%
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0	0%	0%
13	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0%	0%
JUMLAH			7	3	10	70%	30%
14	Juru Tk. I	I/d	0	0	0	0%	0%
15	Juru	I/c	0	0	0	0%	0%
16	Juru Muda Tk. I	I/b	0	0	0	0%	0%
17	Juru Muda	I/a	0	0	0	0%	0%
18	PPPK	IX	0	1	1	0%	100%
JUMLAH			0	0	0	0%	100%
Total			26	16	43	60%	37%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2023)

Berdasarkan Tabel : 2.5 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang rata-rata SDM Aparatur Diskominfo adalah berpangkat Penata Muda Tk I atau yang bergolongan III/d yaitu laki-laki sebanyak 6 orang atau 60% dan perempuan sebanyak 4 orang atau 40%.

Tabel : 2.6
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

No	Esselonisasi	Tingkat Esselonisasi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	Esselon	II.a	1	0	1	100%	0%

2	Eselon	III.a	4	0	4	100%	0%
3	Eselon	IV.a	7	2	9	78%	22%
4	Non Esselon	Staff	12	17	29	41%	59%
TOTAL			24	19	43	100%	81%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2023)

Berdasarkan Tabel : 2.6 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselonisasi rata-rata berstatus Staf atau non Esselon yaitu dengan rincian SDM Aparatur Diskominfosand yang berstatus Staf yaitu laki-laki sebanyak 12 orang atau 41% dan perempuan sebanyak 17 orang atau 59%.

Sementara status eselon IV.a atau Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi atau jabatan fungsional yaitu laki-laki sebanyak 7 orang atau 78% dan perempuan sebanyak 2 orang atau sebesar 22%, dan sementara status Jabatan Fungsional Perencana ada 1 (Satu) jabatan yang lowong dan Pensiun. Namun untuk status Esselon II.a atau Kepala Dinas Dan Esselon III.a atau Sekretaris Dan Kepala Bidang rata-rata berasal dari laki-laki yaitu Esselon II.a sebanyak 1 orang atau 100% dan Esselon III.a sebanyak 4 orang atau sebesar 100%.

Sarana Dan Prasarana Diskominfosan

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pasca ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan terpisah dari Dinas Perhubungan Dan Biro Hubungan Masyarakat, seluruh aset belum dilakukan serah terima, sehingga jumlah dan jenis aset belum dapat diketahui. Sementara itu, bangunan sebagai kantor, moubeler berupa kursi meja dan almari, juga baru sebagian tersedia. Sebagai sarana Pendukung kinerja Diskominfo dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel : 2.7

Keadaan Sarana Dan Prasarana Diskominfosan

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	SATUAN	TYPE	CARA PEROLEHAN	STATUS	KETERANGAN
1	BANGUNAN KANTOR						MASIH BERGABUNG DENGAN KNTR GUBERNUR
2	MEJA KANTOR	12	UNIT	- MEJA KERJA 1 BIRO (EXPO 3002) - MEJA KERJA 1 BIRO (GENERAL)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
3	KURSI KANTOR	10	UNIT	- KURSI KANTOR – TAKANO - KURSI PUTAR PAKAI TANGAN – VERONA KS 900 MTK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
4	LEMARI ARSIP	3	UNIT	- LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU (BROTHER B 203) - LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU KACA (BROTHER B 304)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
5	PC-KOMPUTER	1	UNIT	PC LENOVO AIO A340-22ICK FOES005XID - HITAM	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
6	LAPTOP	4	UNIT	- APPLE MACBOOK AIR M1 CHIP 2020 8GB - NEW MACBOOK AIR 2020	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
7	PRINTER	2	UNIT	EPSON L3110	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
8	PROYEKTOR INFOCUS	1	UNIT	PROJECTOR BENQ	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
9	AC	16	unit				SUDAH ADA

10	MESIN ABSENSI						SUDAH ADA
11	DRONE						SUDAH ADA
12	KAMERA VIDEO	3	UNIT	SONY ALPHA A7 II KIT FE 28-70 MM F/3.5-5-6 OSS	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
13	KENDARAAN DINAS RODA DUA	2	UNIT	- YAMAHA ALL NEW NMAX ABS - YAMAHA ALL NEW AEROX	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
14	LAPTOP MULTIMEDIA	2	UNIT	MSI NOTEBOOK GF639SCSR-HITAM	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
15	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	1	UNIT	EXPANDER 1.5 EXCEED (4X2) M/T – VIN 2019	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
16	TELEVISI	5	UNIT	SMART TV ANDROID	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
17	BRACKET TV	4	UNIT	BRACKET STANDING TV FOR 32-65 INCH	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
18	KOMPUTER MINI/TABLET/IPAD	1	UNIT	APPLE IPAD PRO M1 2021 11 INCH WIFI-CELULLAR 2 TB	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
19	KEYBOARD	1	UNIT	KEYBOARD MINI NUMERIC	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA

20	HANDY TALKIE	40	UNIT	DALCOM JAPAN DL-8500 DUAL WALKIE TALKIE	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
21	MONOPOLE	8	UNIT/TIT IK	MONOPOLE JARINGAN INTERNET	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
22	ACCESPOINT	8	UNIT/TIT IK	ACCESPOINT JARINGAN INTERNET	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
23	PEMELIHARAAN/RENOVASI PERUMAHAN ASN	7	UNIT	- KANOPI BAJA RINGAN - KANOPI KAYU	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
24	TEMPAT TIDUR	14	UNIT	SPRINGBED	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
25	LEMARI	14	UNIT	LEMARI PAKAIAN	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
26	KURSI	7	UNIT	KURSI SOFA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
27	TOWER	1	UNIT	TOWER MINI SITE TABONA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	DESA TABONA KAB. PULAU TALIABU
28	KAIN GORDEN	35	BUAH	KAIN GORDEN	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN

29	RAK PIRING	7	BUAH	RAK PIRING	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
30	EMBER PLASTIK	7	BUAH	EMBER PLASTIK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
31	GAYUNG PLASTIK	7	BUAH	GAYUNG PLASTIK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
32	KESEK KAKI	28	BUAH	KESEK KAKI	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
33	BIOLET/PEMBERSIH TOILET	7	BUAH	PEMBERSIH TOILET	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
34	SAPU	7	BUAH	SAPU	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
35	BANTAL DAN GULING	56	BUAH	BANTAL DAN GULING	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
36	SENDOK BESI	1	LUSIN	SENDOK BESI	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
37	SELIMUT	28	BUAH	SELIMUT	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN

38	DISPENSER MIYAKO, HOT AND COOL	7	BUAH	DISPENSER MIYAKO HOT AND COOL	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
39	JEMURAN HANDUK MINI ALUMINIUM	7	BUAH	JEMURAN HANDUK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
40	SEPREI	28	BUAH	SEPREI 120 M	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
41	TEMPAT SAMPAH	7	BUAH	TEMPAT SAMPAH PLASTIK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
42	PIRING KACA	42	BUAH	PIRING MAKAN KACA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
43	MEJA MAKAN	7	UNIT	MEJA MAKAN + KURSI	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
44	WEBSITE SKPD	1	PAKET	WEBSITE SKPD PROVINSI MALUKU UTARA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
45	WEBSITE SATU DATA	1	PAKET	WEBSITE SATU DATA PROVINSI MALUKU UTARA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
46	E-MAIL SKPD	1	PAKET	E-MAIL SKPD PROVINSI MALUKU UTARA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA

47	COMMAND CENTER	1	PAKET	COMMAND CENTER RUANG RAPAT GUBERNUR	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
48	KABEL VGA 10 METER	1	BUAH	KABEL VGA 10 METER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
49	KABEL HDMI 10 METER	1	BUAH	KABEL HDMI 10 METER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
50	VGA SPLITER 4 PORT	1	BUAH	VGA SPLITER 4 PORT	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
51	HDMI SPLITER 4 PORT	1	BUAH	HDMI SPLITER 4 PORT	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
52	KABEL EKSTENSION 10 METER	2	BUAH	KABEL EKSTENSION 10 METER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
53	KONVERTER HDMI TO VGA	1	BUAH	KONVERTER HDMI TO VGA	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
54	KONVERTER VGA TO HDMI	1	BUAH	KONVERTER VGA TO HDMI	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
55	BATERAI CAMERA CANON 800D	2	BUAH	BATERAI CAMERA CANON 800D	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA

56	TRIPOD GIMBAL STABILIZER DSLR	1	BUAH	TRIPOD GIMBAL STABILIZER DSLR	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
57	TRIPOD GIMBAL STABILIZER HP	1	BUAH	TRIPOD GIMBAL STABILIZER HP	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
58	MICROPHONE TABLE CONFERENCE	1	BUAH	MICROPHONE TABLE CONFERENCE	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
59	KABEL KAMERA DSLR	1	BUAH	KABEL KAMERA DSLR	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
60	LAPTOP/NOTEBOOK	4	UNIT	LENOVO V14-HDD GREY	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
61	HARDISK EXTERNAL	4	BUAH	HDD WD MYPASSPORT EXTERNAL 1 TB	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
62	SSD INTERNAL	1	BUAH	GIGABYTE SSD 1 TB 1,5 INCH SATA3 SSD	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
63	USB MULTIPORT 9IN1	1	BUAH	VENTION CGN MULTIPORT 9IN1 USB	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
64	SCANNER	2	BUAH	SCANNER FUJITSU S1300i	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA

65	PRINTER	1	UNIT	PRINTER EPSON L3210	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
66	PERSONAL COMPUTER (PC) DESKTOP	1	UNIT	ACER ASPIRE THIN AIO C22- 1650	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
67	PERSONAL COMPUTER (PC) DESKTOP	3	UNIT	200 PRO G4 i5 10210U 21.5 AiO	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
68	LAPTOP/NOTEBOOK	2	UNIT	NOTEBOOK B1400CEAE	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
69	PRINTER	1	UNIT	ECOTANK L4260 A4 WI-FI DUPLEX ALL-IN	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
70	PERSONAL COMPUTER (PC) DESKTOP	1	UNIT	ALL IN ONE E5202WHAK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
71	MONITOR PC	1	UNIT	MONITOR 23.8 INCH VP249QGR (ASUS)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
72	LAPTOP	2	UNIT	NITRO 5 AN515-57 INTEL CI7- 11800H	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
73	PERSONAL COMPUTER (PC) DESKTOP	1	UNIT	ALL IN ONE E5202WHAK (ASUS)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA

74	PERSONAL COMPUTER (PC) /CPU	1	UNIT	PC DESKTOP G10CE7011516T2W (ASUS)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
75	PRINTER	1	UNIT	EPSON ECOTANK L3251 A4 WI-FI ALL-IN ONE INK	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
76	EPSON ECOTANK L3210	1	UNIT	ECOTANK L3210	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
77	PC DESKTOP	1	UNIT	MYPC ONE PRO K3 (8N5)	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
78	IPAD PRO M1	2	UNIT	IPAD PRO (GEN3) 11 INCI, WI-FI CELULER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
79	SAMSUNG TABLET	1	UNIT	SAMSUNG GALAXY TAB A8 LTE 10,5 INCH	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
80	NOTEBOOK	1	UNIT	HP NOTEBOOK 245GB RYZEN 3 5300U	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
81	PC DESKTOP	1	UNIT	iMAC 2020 4K 21.5 INCH i5 2.3 GHZ 8 GB MHK03	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
82	KABEL HDMI	2	METER	2.0 ULTRA HIGH SPEAD 4K 50 METER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA

83	KAMERA FDR	1	UNIT	SONY FDR AX100E 4K	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
84	SPEAKER	1	UNIT	KILBURN II	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
85	LENSA CAMERA	1	UNIT	TAMRON 100-400MM	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
86	VIDEO	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
87	SEPEDA MOTOR	1	UNIT	KAWASI D TRACKER	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
88	SEPEDA MOTOR	4	UNIT	HONDA PCX 150 CBS	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
89	SEPEDA MOTOR	1	UNIT	HONDA SCOPY	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	SUDAH ADA
90	KURSI TAMU	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
91	KURSI PEJABAT	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR

92	MEJA PEJABAT	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
93	RAK BUNGA MINIMALIS	2	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
94	GLAS BOARD/PAPAN TULIS KACA	1	BUAH		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
95	KULKAS	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
96	LANTAI KARPET	1	UNIT		PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG GUBERNUR
97	Command Center	1	Paket	TV WALL SAMSUNG	PENGAD AAN MELALUI APBD THN 2022	BARU	RUANG SEKDA & WAGUB
Total							

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun LKJ Diskominfo 2023)

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pasca ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan terpisah dari Dinas Perhubungan Dan Biro Hubungan Masyarakat, seluruh aset belum dilakukan serah terima, sehingga jumlah dan jenis aset belum dapat diketahui. Sementara itu, bangunan sebagai kantor, mebeler berupa kursi meja dan almari, juga belum tersedia.

Bangunan yang sementara dijadikan sebagai kantor, dari segi aspek keamanan tidak dapat memberikan rasa aman. Namun jika di Tinjau dari kelayakannya dan

kapasitas perlu dipertimbangkan kembali karena Gedungnya kecil tidak dapat menampung meubeler bagi ke 56 pegawai.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi, dengan sistematisasi uraian pada Bab I antara lain memuat sejumlah isu berikut:

a) Dasar Pembentukan Organisasi, b) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, c) Aspek Strategis Organisasi, d) Pemasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi organisasi, e) Struktur Organisasi, dan f). Sumber Daya Manusia.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Sistematisasi uraian pada Bab II antara lain memuat sejumlah isu berikut: a) Rencana Strategis, b) Visi, c) Misi, d) Tujuan, e) Sasaran, f) Indikator Kinerja, g) Strategi, h) Kebijakan, i) Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan, dan j) Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini terdapat beberapa sub-bab, yaitu: a) capaian kinerja organisasi, b) analisis pencapaian kinerja, c) pencapaian kinerja lainnya, dan d) realisasi anggaran. Selain itu, dalam ini pula diuraikan hal – hal berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya penjelasan secara sistematis terkait perbandingan data kinerja secara memadai, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
2. Akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dikaitkan pencapaian sasaran strategis, termasuk analisisnya.
3. Penyajian data akuntabilitas kinerja diperkaya dengan gambar, table dan grafik untuk memperjelas uraian dan analisis yang ada. Terkait dengan penyajian data akuntabilitas keuangan, maka jumlah sumber dana dan pengeluarannya dikaitkan dengan pencapaian kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini, dimuat sumber-sumber kajian sebagai muatan dan perbandingan dalam menyusun laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian haruslah memberikan masukan dan hasil yang sesuai dengan Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara, sehingga semua langkah-langkah haruslah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfo Provinsi Maluku Utara yang dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Disadari bahwa, pada tahun 2020 ini, merupakan periode kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan tahun ini juga merupakan awal dari perjalanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, setelah adanya Perda No. 5/2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Namun, hal tersebut tidaklah meruntuhkan semangat dalam mewujudkan proses penyelenggaraan *e-government* dilingkungan Provinsi Maluku Utara, tetapi lebih menjadikannya sebagai pendorong dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah langkah awal yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan melalui program-program strategis yang nantinya dijabarkan lebih detail pada kegiatan-kegiatan guna mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.1. Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yaitu dengan VISI " yaitu dengan VISI "SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah

akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.", serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan dinamika dan isu-isu strategis yang ada. Dengan adanya orientasi dan hal-lah tersebut, maka akronim Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 yaitu "**MALUKU UTARA SEJAHTERA**".

Sementara itu, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 5 misi sebagai berikut :

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Dari ke 5 (lima) misi tersebut, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur maupun Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPMD Provinsi Maluku Utara ada 2 misi, yaitu Misi kedua dan Kelima.

2.1.2. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran 2 Misi

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang atau yang akan dihadapi, maka berikut ini kami uraikan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yaitu sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 3 Sasaran dapat di lihat di bawah ini :

Tujuan 1. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik Sektoral daerah.* Terdapat 2 (dua) Indikator

1. Indeks pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika
2. Indeks penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral

Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika. Sasaran ini terdiri 2 Indikator

- Indikator 1. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website
- Indikator 2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sectoral.

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi

Indikator 2: Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral

Tujuan 2 : *Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian.*

Indikator Tujuan : Indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian

Indikator Sasaran 3 : Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian

Untuk lebih memperjelas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel :2.1
Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Baseline (2019)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik daerah	Indeks pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika	7,0	11,1	13,9	30,6	48,6	72,2
	Indeks penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral	n/a	4,2	12,5	25,0	41,7	62,5
Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	8,3	13,9	22,2	36,1	55,6	80,6
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,6	8,3	13,9	25,0	41,7	63,9

Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	n/a	2,8	8,3	16,7	27,8	41,7
	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	n/a	5,6	16,7	33,3	55,6	83,3
Tujuan 2: Meningkatnya kapabilitas fungsi penunjang pemerintahan Dinas Kominfo dan Persandian	Indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	n/a	60	72,5	75	77,5	80
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	n/a	n/a	12,5	2,5	2,5	2,5

Sumber : Renstra Diskominfo Prov. Maluku Utara 2020-2024

1.1.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

1) Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam pagu indikatif. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut :

- 1) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran pertama yaitu Presentase Organisasi Perangkat Daerah menyebarkan informasi publik.
- 2) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran pertama yaitu Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik.
- 3) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi.
- 4) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral.

- 5) Strategi dari tujuan kedua untuk sasaran pertama Peningkatan Indeks tata kelola Dinas Kominfo & Persandian (poin)

2) **Kebijakan**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang nantinya diambil untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka berikut ini adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran pertama dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan OPD agar dapat menyebarkan informasi publik melalui media website.
- 2) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran pertama dari strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu, Melakukan Percepatan dalam OPD menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- 3) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran kedua dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dalam mendukung layanan keamana informasi pemerintah daerah.
- 4) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran kedua dari strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Penyelenggaran Statistik sektoral di OPD dan Pemerintah Daerah.
- 5) Kebijakan dari tujuan kedua, sasaran ketiga dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo & Persandian.

Untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran, program, kegiatan dan penjelasan/ formula Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat diukur melalui uraian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini :

1.1.2. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran yang di tetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2022 perlu didukung oleh kebijakan dan program , Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan Permndagri No 90 tahun 2019 dan Pentahiran Kepmendagri 90 tahun 2019 m2njadi Kepmendagri 050- 3708 tahun 2020 yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Kebijakan Melaksanakan Strategi Menyediakan Kebutuhan Layanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran** *melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terdiri 8 kegiatan dan 71 Sub kegiatan yang mendukung Operasional OPD Dinas Kominfo dan Persandian*
- 2. Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** *melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Yang mendukung E-Goverment Pemerintah Daerah melalui komnikasi Publik .Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan terdiri 13 Sub kegiatan dan pengembangan Media Center*
- 3. Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Informatika** *melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang mendukung SPBE dan e-Government. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan*
- 4. Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah** *melalui Program Pengelolaan Statistik sectoral yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan pembangunan;*

5. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Melaksanakan dukungan pengamanan informasi pada aspek ancaman non militer sesuai UU No. 57 Tahun 2014 Tentang Pedoman Strategis Pertahanan NIR-MILITER melalui :**
 - 1) *Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Persandian Daerah;*
 - 2) *Program Pembinaan Dan Pengamanan Persandian Daerah;*
 - 3) *Program Pembinaan Dan Pengelolaan Layanan Statistik Sektoral.*
6. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Mereformasi tata kelola pemerintahan dan budaya kerja birokrasi yang tidak efektif dan efisien, menjadi lebih efektif serta berkinerja tinggi melalui pemanfaatan dan penggunaan Sistem Informasi TIK melalui Program Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Dan Komunikasi;**
7. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Memfasilitasi dan menumbuhkan serta mengembangkan minat dan bakat SDM Aparatur dan masyarakat pecinta TIK melalui Program Pengembangan Dan Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Dan Masyarakat.**
8. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Menyediakan perangkat dan tenaga pengelolaan layanan informasi publik secara online dan reel time melalui :**
 - 1) *Program Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Komunikasi Melalui Sistem Informasi;*
 - 2) *Program Pengelolaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Opini Dan Aspirasi Publik;*
 - 3) *Program Pelaksanaan Kerjasama Media Masa Dalam Menyebarkan Informasi Dan Komunikasi.*

2.2. Sasaran, Indikator Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2020

Sasaran, indikator sasaran kinerja dan program serta kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) 2020-2024, merupakan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Utara melalui tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Maluku Utara.

Adapun sasaran, indikator kinerja sasaran yang memuat terkait dengan program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 2.3
Sasaran, Indikator Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan infomasi publik melalui websitite	I Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Perangkat Daerah yang menyebarkan infomasi publik melalui website (kumulatif)	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA
			1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (persen)	
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (kumulatif)	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Teknologi Informasi Dan E-Government
			1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (persen)	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Komunikasi dan Keamanan Jaringan TIK
			2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (persen)	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Komunikasi dan Keamanan Jaringan TIK
2	Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sectoral	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informas	III Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (kumulatif)	Kepala Bidang Persandian Dan Statistik
			1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

					(persen)	
			2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (persen)	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral (kumulatif)	Kepala Bidang Persandian Dan Statistik
			1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (persen)	
3	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Dinas Kominfo dan Persandian	
					Nilai LKj Dinas Kominfo dan Persandian	
			1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2	Administrasi Keuangan	Cakupan Pengelolaan Keuangan	
			3	Administrasi Umum	Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran	
			4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	

Sumber : Renstra Diskominfosan Prov. Maluku Utara 2020-2024

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel : 2.8
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Misi ke 2 Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah,	Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:	Indeks konektifitas wilayah	

Sumber : Renstra Diskominfo Prov. Maluku Utara 2020-2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfoantik Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 didukung dengan anggaran Rp. 14.916.824.972 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara terlampir pada lampiran LKj ini pada Halaman Tersendiri.

Tabel : 2.9
Perjanjian kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	%	22,2
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	13,9
2	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sectoral	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	%	8,3
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	%	16,7
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	%	72,5

Sumber : Renstra Diskominfo 2020-2024

PENJELASAN TABEL DI ATAS

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai 3 Sasaran sebagaimana terdapat pada RPJMD Pemerintah Daerah maupun Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagaimana terdapat pada table di atas. Untuk mendukung program kerja target pemerintah dari sasaran tersebut terdapat beberapa kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan secara singkat di bawah ini.

1. Pada Sasaran 1 : Sasaran 1 Terdapat 2 Indikator, pada Sasaran ini terdapat kegiatan yang ingin dicapai pada sasaran pada tahun 2023 dengan masing masing target yang terdapat pada table di atas.
2. Pada Sasaran 2 : Sasaran 2 Terdapat 2 Indikator, pada Sasaran ini terdapat kegiatan yang ingin dicapai pada sasaran pada tahun 2022 dengan masing masing target yang terdapat pada table di atas.
3. Pada Sasaran 3: Sasaran 3 Terdapat 1 Indikator yaitu yang mendukung Manajemen atau tatakelola Pada dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan perwujudan dari pelaksanaan Tugas dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

Tabel : 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

* Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Tabel: 3.2

Target dan Realisasi Kinerja 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan	42	42	100%	Sangat Baik

informasi publik serta aplikasi Informatika	infomasi publik melalui websitite				
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	41	102%	Sangat Baik
Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	42	7	600%	Cukup
	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	48	48	100%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	80	91%	Sangat Baik

Dalam melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dilakukan penilaian kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan Pengukuran kinerja adalah indikator sasaran dikalikan hasil kegiatan /Realisasi di bagi Target di kalikan Seratus Presen seperti pada rumus di bawah ini.

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Ralita}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari Rumus diatas, di bawah ini akan ditampilkan beberapa capaian Indikator dari sasaran.

Indikator 1

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Perangkat Daerah} \\ \text{yang menyebarkan infomasi} \\ \text{publik melalui website} \end{array} = \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

Pada indikator ini menunjukkan bahwa Realisasi Sangat tercapai target yang di inginkan namun dari segi Target prosentase memenuhi target yang di diharapkan dari 42 menjadi 100% Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara Maksimal
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT sedikit demi sedikit bertambah walaupun belum memadai sesuai yang diharapkan

Indikator 2

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	100%	= 102%
	41		

Pada Indikator 2 ada beberapa OPD SBE namun pada OPD tersebut tidak semua unit atau bidang Pada OPD menggunakan SPBE

Pada indikator ini menunjukkan bahwa Realisasi sangat tercapai target yang di inginkan namun dari segi Target prosentase Melebihi dari target yang di diharapkan dari 42 menjadi 41 . Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara Maksimal
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT Pada masing-masing OPD bertambah Sebagai pengelola SPBE walaupun belum memadai sesuai yang diharapkan

Indikator 3

Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	42	100%	= 600%
	7		

Pada Indikator 3 ini menunjukkan bahwa Realisasi tidak bisa tercapai target yang di inginkan namun dari segi Target presentase Melebihi dari target yang di harapkan dari 42 menjadi 7 . Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang di Alokasikan untuk Kegiatan Persandian masih belum memadai untuk mencapai target yang di harapkan.
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT dan SDM Persansandian belum memadai sesuai kebutuhan

Indikator 4

Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	42	100%	= 100%
	42		

Pada Indikator 4 pada Indikator 3 menunjukkan bahwa Realisasi tercapai target yang di inginkan. Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang di Alokasikan untuk Kegiatan Persandian masih belum memadai untuk mencapai target yang di harapkan.
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang Statistik belum memadai baik dari Kwantitas maupun Kualitas.
4. Adanya Sebageian besar OPD kurang Perhatian yang seruis terhadap Data Sektoral.

Indikator 5

Capaian Indikator kinerja	73	100%	= 91%
	80		

Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	100%	= 91%
	80		

Tabel: 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Capaian 2022	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui websitite	42	42	100%	70%	sangat baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	41	102%	90%	Sangat Baik
	Meningkatnya kapabilitas	Persentase Perangkat	42	7	600%	600%	Baik

	pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Daerah yang menerima layanan keamanan informasi					
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	48	48	100%	100%	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	80	91%	80%	Baik

Penjelasan : Pada tabel diatas menunjukkan kegiatan pada tahun 2022 banyak Kegiatan yang kurang Maksimal dalam Pelaksanaan kurang didukung dengan Anggaran direlokasi tidak Mencukupi atau kurang *capaian 70% (Tujuh Puluh)* berarti kegiatan sama sekali kurang mencukupi.

Tabel: 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 dg tahun Renstra 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Renstra 2022	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	42	42	100%	56,6	Sangat baik

	aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	42	41	102%	41,7	Sangat Baik
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	42	7	600%	27,8	Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	48	48	100%	55,6	Sangat Bagus
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	80	91%	77,5	Baik

Penjelasan : Pada table 3.4. di atas Target pada Renstra Sama dengan Target Tabel capaian kinerja diskominfo sama dengan Target pada Renstra . Tetapi realisasi Capaian Kinerja Melebihi target Pada Renstra.

Tabel: 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 dengan Standar Nasional 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standart Nasional	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui websitite	42	42	100%	80	sangat baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	41	102%	80	Sangat Baik
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	42	7	600%	< 3	Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	48	48	100%	70	Sangat Bagus
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	80	91%	72,5	Baik

Keterangan Tabel 3.5 :

4. Pada Tabel ini Capaian Kinerja Diskominfo Maluku Utara Melebihi Standar Nasional Pada Kementerian Kominfo RI.
5. Pada Penyelenggaraan Statistik dan Persandian secara Nasional belum di dapatkan terkendala dari masing – masing Renstra

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan , boleh juga disebut Membandingkan Realisasi dengan Target. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel : 3.6
Analisis Target Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja tahun

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Kriteria Peringkat
			Target	Realisasi	Porsentase Realisasi	
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui websitite	42	42	100%	Naik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	41	102%	Naik
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan	42	7	600%	naik

	publik serta aplikasi Informatika	keamanan informasi				
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	48	48	100%	Naik
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	73	80	91%	tinggi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

1. Jika di lihat dari Tabel di atas maka Kinerja Diskominfo Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan hal ini bisa di lihat pada table di atas pada kolom Capaian Kinerja yang melebihi Target , hal ini disebabkan penggunaan Anggaran secara maksimal dan SDM yang Maksimal pula walaupun SDM yang di harapkan Kurang memadai
2. Ada beberapa Sasaran yang belum Tercapai secara maksimal atau yang di harapkan. Seperti Persandian. Hal ini di sebakn Terkendala masalah Anggaran dan Sumberdaya Manusia
3. Ada beberapa Kegiatan dan Sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam mencapai Misi dan Misi Gubernur, hal ini disebabkan tidak Tercukupi anggaran anggaran yang di Alokasikan pada Dinas Kominfo pada tahun 2023 Sehingga Target tidak bisa tercapai.

Alternatif Solusinya adalah Melanjutkan Kegiatan 2024 yang masih berjalan dan menganggarkan untuk mendorong kegiatan sehingga selesai dengan Langkah Langkah sebagai Berikut :

- a. Merencanakan dengan tepat segala aktifitas kegiatan yang akan dikerjakan
- b. Menjadwal Ulang kegiatan

- c. Mengganggu rencana biaya kegiatan
- d. Mempersiapkan SDM sesuai kapasitas Bidang

6. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya

Sumberdaya yang di miliki pada Dinas komunikasi Informatika dan Persandian adalah:

1. Sumber Dana
 2. Sumberdaya Manusia
 3. Sumber daya asset dan Peralatan lain yang dimiliki
- Sumber Dana Dinas Kominfo sangat Terbatas (Kecil jika di bandingkan dengan Kebutuhan Sektor Kominfo di Maluku Utara. Akibatnya Banyak kegiatan yang tidak terbiayai.
Penggunaan Sumber Dana pada Diskominfo berbasis Tepat guna dan Efesian. Artinya Anggaran yang di dapat di Gunakan untuk membiayai Kegiatan yang sifatnya Urgen dan sangat penting yang hasilnya segera bisa di Manfaatkan untuk kebutuhan Kominikasi dan Informasi di maluku Utara. Efisiensi Penggunaan sumber dana pada Dinas Kominfosan Maluku Utara dapat dilihat pada table berdasarkan Realisasi Fisik dan keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan persandian. Efesiaensi Penggunaan anggaran dapa di lihat pada table di bawah ini:
Solusinya. Penambahan Anggaran Kegiatan untuk Tahun yang akan Datang.
 - SDM di Rasakan Sangat Perperan sekali dalam mencapai Kinerja, Tanpa adanya SDM Kinerja Tidak mungkin berhasil, namun SDM di Kominfo Khususnya Bidang IT dan SDM yang Mendukung bTercapainya Kinerja Masih Kurang sesuai yang diharapkan (Standard). Solusinya Penambahan SDM
 - Sumber daya Peralatan yang dimiliki Kominfo Juga sangat Mendukung tercapainya Kinerja Walaupun Balum Memadai, Khususnya Peratan Komunikasi Baik Hardware maupun Software, sehingga Kedepannya Perlu Pengadaan.

Tabel 3.7.
Efisiensi Anggaran Terdapat Pada Lampiran 2.

TABEL 3.8
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN T.A 2023
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PROGRESS/PERKEBEMBANGAN				SISA ANGGARAN (RP)	KET
			KEUANGAN		FISIK			
			REALISASI S.D 31 NOVEMBER		REALISASI S.D 31 DESEMBER			
		RP	%	RP	%			
1	2	3	4	5 (ED*100)	6	7	8 (DE)	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.350.000,00	75.350.000,00	100,00	75.350.000,00	100,00	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.752.500,00	36.752.500,00	100,00	36.752.500,00	100,00	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	-	100,00	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	143.848.000,00	143.848.000,00	100,00	143.848.000,00	100,00	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34.418.120,00	32.480.000,00	94,37	32.480.000,00	94,37	1.938.120,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.132.000,00	21.820.000,00	86,82	-	86,82	3.312.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.610.000,00	-	0,00	-	0,00	23.610.000,00	
JUMLAH		353.860.620,00	325.000.500,00	91,84	325.000.500,00	91,84	28.860.120,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.165.000,00	4.078.403.413,00	95,71	4.078.403.413,00	95,71	182.761.587,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.080.000,00	137.080.000,00	100,00	137.080.000,00	100,00	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	81.840.750,00	81.840.750,00	100,00	81.840.750,00	100,00	-	
JUMLAH		4.480.085.750,00	4.297.324.163,00	95,92	4.297.324.163,00	95,92	182.761.587,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36.048.000,00	36.048.000,00	100,00	36.048.000,00	100,00	-	
JUMLAH		36.048.000,00	36.048.000,00	100,00	36.048.000,00	100,00	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	-	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.718.000,00	74.718.000,00	100,00	74.718.000,00	100,00	-	
JUMLAH		274.718.000,00	274.718.000,00	100,00	274.718.000,00	100,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.572.600,00	69.829.775,00	97,56	69.829.775,00	97,56	1.742.825,00	
2	Fasilitas Kunjungan Tamu	73.060.000,00	73.060.000,00	100,00	73.060.000,00	100,00	-	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790.402.930,00	735.641.855,00	93,07	735.641.855,00	93,07	54.761.075,00	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PROGRESS/PERKEBANGGAN				SISA ANGGARAN (RP)	KET
			KEUANGAN		FISIK			
			REALISASI S.D 31 NOVEMBER		REALISASI S.D 31 DESEMBER			
		RP	%	RP	%			
JUMLAH		935.035.530,00	878.531.630,00	93,96	878.531.630,00	93,96	56.503.900,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.198.000,00	-	0,00	-	0,00	107.198.000,00	
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.680.000,00	103.115.500,00	64,18	103.115.500,00	64,18	57.544.500,00	
JUMLAH		267.878.000,00	103.115.500,00	38,50	103.115.500,00	38,50	164.742.500,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.000.000,00	491.000.000,00	86,75	491.000.000,00	86,75	75.000.000,00	
JUMLAH		566.000.000,00	491.000.000,00	86,75	491.000.000,00	86,75	75.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pperizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.490.000,00	-	0,00	-	0,00	12.490.000,00	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.900.000,00	-	0,00	-	0,00	7.900.000,00	
JUMLAH		20.390.000,00	-	0,00	-	0,00	20.390.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
	1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	343.614.000,00	343.614.000,00	100,00	343.614.000,00	100,00	-	
	2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	150.000.000,00	
	3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	388.158.706,00	388.158.706,00	100,00	388.158.706,00	100,00	-	
	4 Pelayanan Informasi Publik	113.388.000,00	-	0,00	-	0,00	113.388.000,00	
	5 Layanan Hubungan Meedia	250.000.000,00	248.834.000,00	99,53	248.834.000,00	99,53	1.166.000,00	
	6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	391.100.000,00	391.100.000,00	100,00	391.100.000,00	100,00	-	
	7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	770.748.250,00	755.891.750,00	98,07	755.891.750,00	98,07	14.856.500,00	
	8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	300.000.000,00	299.932.564,00	99,98	299.932.564,00	99,98	67.436,00	
	9 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000,00	-	0,00	-	0,00	400.000.000,00	
JUMLAH		3.107.008.956,00	2.427.531.020,00	78,13	2.427.531.020,00	78,13	679.477.936,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
	1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.097.427.012,00	1.417.296.564,00	45,76	1.417.296.564,00	45,76	1.680.130.448,00	
JUMLAH		3.097.427.012,00	1.417.296.564,00	45,76	1.417.296.564,00	45,76	1.680.130.448,00	
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
	1 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	100	-	100	-	
	2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	617.465.900,00	617.465.900,00	100	617.465.900,00	100	-	
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	49.950.000,00	49.950.000,00	100	49.950.000,00	100	-	
	4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	449.489.004,00	449.489.004,00	90	449.489.004,00	90	50.003.000,00	
	5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	132.991.200,00	132.991.200,00	100	132.991.200,00	100	-	
	6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	298.497.000,00	298.497.000,00	100	298.497.000,00	100	-	
JUMLAH		1.778.393.104,00	1.728.390.104,00	97	1.728.390.104,00	97	50.003.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	212.671.650,00	212.671.650,00	100,00	212.671.650,00	100,00	-	
	2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	199.999.730,00	199.999.730,00	100,00	199.999.730,00	100,00	-	
JUMLAH		412.671.380,00	412.671.380,00	100	412.671.380,00	100	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
	1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	158.428.014,00	158.428.014,00	100,00	158.428.014,00	100,00	-	
	2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	104.321.600,00	102.671.600,00	98,42	102.671.600,00	98,42	1.650.000,00	
JUMLAH		262.749.614,00	261.099.614,00	99,37	261.099.614,00	99,37	1.650.000,00	
TOTAL		13.892.243.966,00	12.892.726.478,00	81,18	12.892.726.478,00	81,18	2.938.019.491,00	

Keterangan Warna di Tabel
 Kepala Tabel
 Program Kegiatan
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
 Jumlah Sub Kegiatan
 Total Keseluruhan Page Kegiatan

Penjelasan Program dan kegiatan Pada Realisasi Fisik dan Keuangan

1. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan adalah realisasi anggaran yang di pergunakan untuk membiayai Program/Kegiatan untuk mencapai kinerja OPD untuk tahun anggaran 2023 pada Urusan Komunikasi ,Informatika dan Persandian serta Statistik Provinsi Maluku Utara, Pembiayaan Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai bukti nyata capaian kinerja berupa fisik. Besaran alokasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi

Maluku Utara sebesar Rp.15.592.245.966 dengan Realisasi sebesar Rp.12.652.726.475 Sedangkan sisanya merupakan Efisiensi Anggaran.

2. **Realisasi Fisik**

Yang di maksud Realisasi Fisik adalah Hasil atau capaian kinerja Bukti nyata dari Pembiayaan Kegiatan yaitu sumber Dana yang di miliki Oleh dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Capaian kinerja fisik ini ber bentuk Fakta dan Maya.

Bentuk nyata adalah Capaian kinerja yang dapat di lihat dengan kasak mata, sedangkan bentuk maya adalah bentuk yang tidak bisa dilihat dengan kasak mata sebaga Contoh : Pengadaan Software, Pengadaan Internet dan aplikasi Lainnya.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Tinjauan keberhasilan

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan tahun Keempat dari Rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan juga merupakan Tahun kedua Periode II Gubernur Maluku Utara Terpilih.

Adapun hasil capaian kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 ini yang merupakan Perwujudan hasil capaian indikator kinerja, Merupakan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dari tim penilai kinerja yang telah ditetapkan, maka melalui hasil evaluasi dan analisa sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 Dapat merealisasikan Program dan kegiatan.

pada kesimpulan atas hasil penilaian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Organisasi dan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan ditandatangani Bersama antara Pemberi tugas dan penerima tugas tahun 2023.

IV.2. Permasalahan dan Kendala yang dialami

Kendala yang di alami pada pelaksanaan kegiatan 2023 adalah :

1. Pada Program kerja / kegiatan yang dalam penganggaran tidak mencukupi
2. SDM yang masih kurang memadai sesuai kebutuhan baik tenaga Profesional/Ahli dan tenaga pendukung lainnya.
3. Kondisi sekretariat Kerja / Gedung sangat kecil sehingga tidak mampu menampung ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara
4. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang tidak memadai
5. Akses Layanan Internet masi kurang dalam Hak Akses Bandwith

IV.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang mengakibatkan Capaian kinerja tidak bisa maksimal maka solusi yang di usulkan Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah seperti di bawah ini. :

- 1) Menyusun Usulan Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja OPD.
- 2) Menyusun dan mengusulkan Anggaran untuk membiayai Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja
- 3) Pengadaan ASN baru Baik CPNS maupun P3K di bidang IT dan keahlian Lainnya, Diklat ASN sesuai kebutuhan OPD
- 4) Pengusul pembangunan Kantor/Gedung sebagai sekretariat bekerja
- 5) Peningkatan pengadaan sarana dan Prasarana yang sangat mendesak untuk pencapaian Kinerja

Dengan Usulan Solusi ini semoga Program dan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023 untuk diusulkan kembali tahun anggaran berikutnya Sehingga Program RPJMD Visi dan Misi Gubernur untuk "**Maluku Utara Sejahtera**" dapat Terealisasi